

# **KAJI TINDAK (*ACTION RESEARCH*) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN DAERAH TERTINGGAL**



**Edi Basuno  
Rita Nur Suhaeti  
Gelar S. Budhi  
Muhammad Iqbal**



**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
2007**

## **Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Kaji tindak (action research) pemberdayaan masyarakat pertanian daerah tertinggal (tahap II) / Edi Basuno ... [et al.]. -- Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2008.  
173 hlm. ; 24 cm.

ISBN : 978-979-3566-63-4

1. Petani.                I. Edi Basuno

305.563

### **Dewan Editor :**

Pantjar Simatupang  
Bonar Sinaga  
Kedi Suradisastra  
Yusmichad Yusdja  
Felix Sitorus  
Mahyudin Syam

### **Desain dan Tata Letak :**

Agus Suwito

Diterbitkan oleh :

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  
Departemen Pertanian

Jl. A. Yani No. 70, Bogor

Telp. : (0251) – 333964

Fax. : (0251) – 314496

E-mail : [caser@indosat.net.id](mailto:caser@indosat.net.id), [publikasi\\_psekp@yahoo.co.id](mailto:publikasi_psekp@yahoo.co.id)

Website : <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>

ISBN : No. 978-979-3566-63-4

Hak Cipta pada penulis. Tidak diperkenankan memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penulis.

## KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT

Sejak tahun 2005, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), telah menerbitkan Buku Tematik yang merupakan Laporan Hasil Penelitian terbaik peringkat 1 sampai 3 Tahun Anggaran sebelumnya. Buku Tematik diharapkan dapat dibaca oleh khalayak yang lebih luas, sehingga dari sisi format dan sistematika penulisan telah disesuaikan dengan keragaman pembacanya, agar lebih mudah dipahami. Untuk maksud tersebut, dibentuk Dewan Editor yang terdiri dari beberapa orang pakar yang kompeten dalam bidang keredaksian dan publikasi ilmiah dari Badan Litbang Pertanian maupun Institut Pertanian Bogor.

Buku “Kaji Tindak (*Action Research*) Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Tertinggal” merupakan peringkat 3 terbaik hasil laporan penelitian tahun 2006. Buku ini berisi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Sukabumi dan Bogor pada tahun 2006. Penekanan kegiatan lebih diutamakan pada memfasilitasi penguatan modal kelompok melalui simpan pinjam dan kerjasama subkelompok peternak dengan Kampoeng Ternak, Dompot Duafa Republika. Prioritas kegiatan ditentukan dari keinginan masyarakat sendiri berdasarkan manfaat yang telah dirasakan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Walaupun perkembangannya cukup signifikan, tetapi kegiatan ini masih dihadapkan pada beberapa kendala yang secara sistematis akan diuraikan dalam buku ini.

PSEKP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Editor, penulis dan semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat sebagai materi pembelajaran bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat atau sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah pertanian dan perdesaan

Bogor, Agustus 2007

Kepala Pusat,

Dr. Tahlim Sudaryanto  
NIP. 080 035 289

## **KATA PENGANTAR EDITOR**

Upaya Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) untuk mendokumentasikan hasil penelitian terbaiknya dalam wujud buku tematik patut mendapat apresiasi dan dukungan. Sebagai lembaga yang menggeluti bidang penelitian, penerbitan buku ini diharapkan dapat memacu semangat para peneliti untuk meningkatkan kualitas hasil karyanya, membangkitkan gairah kompetisi yang sehat, sekaligus sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan PSEKP kepada para pengguna.

Sesuai dengan mandat yang diberikan, tugas utama Dewan Editor adalah membantu dalam memperbaiki format, tampilan, dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh beragam kalangan pembaca. Dewan Editor tidak terlalu memberi penekanan pada perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, tetapi hanya memberikan saran dan masukan yang konstruktif agar tulisan lebih terarah dan berbobot. Diakui bahwa tidak semua saran mampu diakomodasi oleh Tim Penulis, akibat kendala yang bersifat teknis maupun non teknis. Walaupun demikian, upaya untuk mewujudkan sebuah karya buku tematik yang terbaik telah secara maksimal dilakukan.

Dewan Editor mengucapkan terima kasih kepada kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Dewan Editor untuk mengedit buku ini. Dewan Editor mengakui bahwa hasil akhir buku ini masih jauh dari sempurna. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk perbaikan buku tematik di masa mendatang. Kepada Tim Penulis, Dewan Editor juga menyampaikan apresiasi atas jerih payah dan kerja keras untuk memperbaiki tulisannya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan program pembangunan pertanian yang efektif sehingga mampu mengangkat martabat dan kesejahteraan masyarakat pertanian Indonesia.

Editor

## EXTENDED ABSTRACT

The ultimate goal of agricultural development is not a mere of increasing production, but to develop the community's production. Field oriented programs, nicknamed as micro-programs, have shown their roles as a way to fulfill specific cultural needs, market and particular micro-climate in relation to farmer's living standard requirements. Such micro-programs are established through proper utilization of the available local resources such as local wisdom, leadership talents and other existing local institutions. Effort of community empowerment comprises facilitating the community, particularly those with limited access to resources, in terms of improving the effort related to their own living standard. The failure in accommodating the community's needs negatively affect the sustainability of such a program due to lack of sense of belonging among the members of the community. On the other side, a participatory community empowerment provides better hope on positive result of such a program and of the program's sustainability.

An action research was implemented in the Regencies of Bogor and Sukabumi. Each district was represented by one hamlet in a selected village and sub-regency (*kecamatan*). The purposefully selected hamlets were the hamlets of Leuwijambe, village Kadumanggu, sub-district Babakan Madang, the Regency of Bogor, and Pasantren, village Balekambang, sub-district Nagrak, the Regency of Sukabumi. The objectives were to facilitate participatory community action planning to develop collaborative network among groups and outsiders such as trader and business groups, and related government and non government institutions.

Participatory action research in the study location were adjusted to the actual field condition. Such adjustments were made in line with the existing local situation. The training which was provided and continuously carried-out was a way to accelerate the transfer of both technology and knowledge from the source to the participants as the recipients. The training was carried-out in bioth class and the field and a learning-by-doing approach was employed. The training material relevant to the needs of the participants was properly developed. A structured questionnaire was employed to collect data and information related to the community's perception on various group's activities. Likerst scaling was employed to group the information which further be interpreted using Likert's average weigher score.

Training on pest control on plant and the production technique of organic fertilizer was provided by the Healthy Farming Institute (LPS) in Cinagara, Bogor. Visit by farmer group to the LPS and Healthy Sheep Livestock (TDS) were carried out to both and learn to prepare aerobe and anaerobe organic fertilizer. In the visit to TDS, farmers were introduced to

the concept of Kampoeng Ternak (KT) Program (Livestock Hamlet Program) developed by Dompot Dhuafa (Wallet for the Poor) of the Republika Newspaper. Training on house wares processing in the location of Bogor was conducted with the facilitation of the Office of Industry and Trade Services (*Disindag*) in Laa NoNa Gallery. Such an activity was marked as an initial step of the development of *Maju Bersama* Handicraft Group. Furthermore, with the facilitation of Agency for Community Empowerment and Social Welfare (BPMKS), training on cake processing was carried out in village Kadumanggu during the period of November 16-20, 2006.

Women saving-and-loan groups were developed in both study locations. Such groups were evolved from local *arisan* groups in the study sites. In the location of Sukabumi such saving-and-credit group increased from one to three groups, whereas in the location of Bogor the group grew from three to four during the period of the study. The total number of group members were noted at 79 members. The saving-and-loan activity was able to raise group capital as well as promoting gender empowerment in the area.

## RINGKASAN

Tujuan akhir pembangunan pertanian tidak semata untuk meningkatkan produksi, tetapi membangun masyarakat tani seutuhnya. Program-program mikro di tingkat operasional justru berperan bagi pemenuhan keperluan khas lingkungan budaya, pasar, dan iklim mikro tertentu dalam upaya peningkatan kehidupan petani. Program-program mikro dapat dibangun melalui sumber daya setempat berupa pengetahuan tradisional, bakat-bakat kepemimpinan serta jenis-jenis organisasi lokal lainnya. Upaya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya meliputi tindak memfasilitasi masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang kurang beruntung lainnya, agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Kegagalan mengakomodasi keinginan masyarakat berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak berkelanjutan. Dalam kondisi demikian masyarakat tidak merasa memiliki kegiatan yang dilakukan tersebut. Di sisi lain, pemberdayaan melalui kaji tindak partisipatif umumnya memberikan hasil yang lebih baik berupa jaminan keberlanjutan kegiatan tersebut.

Kegiatan kaji tindak dilaksanakan di Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Di tiap kabupaten dipilih satu kecamatan dan satu desa secara sengaja. Dari desa terpilih ditentukan satu dusun kegiatan. Lokasi terpilih di Kabupaten Bogor adalah Dusun Leuwijambe, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang. Di Kabupaten Sukabumi dipilih Dusun Pasantren, Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak. Tujuan kegiatan adalah memfasilitasi masyarakat melakukan kaji tindak partisipatif dalam mewujudkan jejaring kerjasama antara kelompok dengan pihak luar, seperti pedagang, pengusaha dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait.

Kegiatan kaji tindak di kedua lokasi disesuaikan dengan kondisi riil lapangan. Upaya-upaya penyesuaian dilakukan sejalan dengan perkembangan kondisi lapang. Pelatihan yang diberikan secara kontinyu merupakan media transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dari nara sumber ke anggota masyarakat peserta pelatihan. Pelatihan dilakukan dalam kelas dan di lapangan. Pelatihan dilakukan dengan menerapkan sistem *learning by doing*. Materi pelatihan didasarkan pada kebutuhan peserta. Kuesioner terstruktur digunakan untuk menghimpun data dan informasi terkait persepsi anggota kelompok terhadap berbagai kegiatan kelompok. Data yang diperoleh dikelompokkan dengan skala Likert (*Likert scaling*) dan diinterpretasikan dengan skor rata-rata tertimbang (*average weighed score*).

Pelatihan penanggulangan hama tanaman dan cara-cara pembuatan pupuk organik dilakukan oleh Lembaga Pertanian Sehat (LPS) di Cinagara, Bogor. Kunjungan kelompok tani ke LPS dan ke Ternak Domba Sehat (TDS) dilakukan untuk memahami dan mempelajari teknik

pembuatan pupuk organik (*aerob dan anaerob*). Dalam kunjungan ke TDS, kelompok tani diperkenalkan kepada program Kampoeng Ternak (KT) dari Dompot Dhuafa, harian Republika. Pelatihan pembuatan peralatan rumah tangga di lokasi Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan fasilitasi Dinas Industri dan Perdagangan di Galeri Laa NoNa. Kegiatan ini merupakan awal tumbuhnya kelompok kerajinan *Maju Bersama*. Lebih jauh lagi dilaksanakan pula pelatihan pembuatan kue di Desa Kadumanggu selama 5 hari (bulan Nopember 2006) dengan fasilitasi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (BPMKS).

Di kedua lokasi kegiatan dikembangkan kelompok simpan pinjam ibu-ibu yang berawal dari kegiatan kelompok arisan. Jumlah kelompok simpan pinjam di lokasi Kabupaten Sukabumi berkembang dari satu menjadi tiga kelompok dan di lokasi Kabupaten Bogor berkembang dari tiga menjadi empat kelompok. Jumlah total seluruh anggota kelompok adalah 79 orang. Kegiatan simpan-pinjam yang dikembangkan mampu melepaskan ketergantungan terhadap usaha bank keliling dan mampu mewujudkan modal kelompok serta tumbuhnya proses pemberdayaan gender perempuan.

**DAFTAR ISI**

|                                                                                  | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT .....                                                | i       |
| KATA PENGANTAR EDITOR .....                                                      | ii      |
| EXTENDED ABSTRACT.....                                                           | iii     |
| RINGKASAN.....                                                                   | v       |
| DAFTAR ISI .....                                                                 | vii     |
| DAFTAR TABEL .....                                                               | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                              | x       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                             | xi      |
| <br>I. PENDAHULUAN.....                                                          | <br>1   |
| II. PEMBERDAYAAN PETANI.....                                                     | 4       |
| 2.1. Strategi Pemberdayaan melalui Kaji Tindak.....                              | 4       |
| 2.2. Pengertian, Sejarah dan Pengalaman Kaji Tindak di<br>Indonesia.....         | <br>5   |
| III. METODOLOGI KAJI TINDAK.....                                                 | 8       |
| 3.1. Kerangka Pemikiran .....                                                    | 8       |
| 3.2. Lokasi Penelitian .....                                                     | 10      |
| 3.3. Kerangka Kaji Tindak di Kabupaten Sukabumi dan Bogor.                       | 12      |
| 3.4. Analisis Data Kaji Tindak .....                                             | 14      |
| IV. KAJI TINDAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN DI<br>KABUPATEN SUKABUMI ..... | <br>17  |
| 4.1. Pelaksanaan Kaji Tindak.....                                                | 17      |
| 4.1.1. Koordinasi Lintas Kelembagaan.....                                        | 17      |
| 4.1.2. Penghimpunan Modal Kelompok .....                                         | 18      |
| 4.1.3. Pelatihan .....                                                           | 19      |
| 4.1.4. Kunjungan Lapang.....                                                     | 20      |
| 4.2. Pencapaian.....                                                             | 22      |
| 4.2.1. Pengembangan Kelembagaan pada Remaja Tani..                               | 22      |
| 4.2.2. Kegiatan Simpan Pinjam.....                                               | 23      |
| 4.2.3. Persepsi Masyarakat.....                                                  | 25      |
| V. KAJI TINDAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN DI<br>KABUPATEN BOGOR.....      | <br>31  |
| 5.1. Pelaksanaan Kaji Tindak.....                                                | 31      |
| 5.1.1. Proses Penghimpunan Data dan Informasi.....                               | 31      |
| 5.1.2. Koordinasi Lintas Kelembagaan.....                                        | 33      |

---

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.3. Kerja Sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)..... | 35  |
| 5.1.4. Pendampingan Kelompok .....                             | 36  |
| 5.2. Pencapaian Kaji Tindak.....                               | 38  |
| 5.2.1. Penyuluhan Peternakan .....                             | 38  |
| 5.2.2. Simpan Pinjam .....                                     | 40  |
| 5.2.3. Persepsi Masyarakat.....                                | 40  |
| VI. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.....                     | 44  |
| 6.1. Rangkuman.....                                            | 44  |
| 6.1.1. Kabupaten Sukabumi.....                                 | 44  |
| 6.1.2. Kabupaten Bogor.....                                    | 45  |
| 6.2. Implikasi Kebijakan.....                                  | 46  |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                            | 50  |
| DOKUMENTASI KEGIATAN .....                                     | 100 |

**DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                              | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.1. Lokasi Contoh Kaji Tindak ( <i>Action Research</i> ) Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Tertinggal, 2005.....           | 11      |
| 4.1. Persepsi Anggota Kelompok Terhadap Berbagai Kegiatan, 2006 .....                                                        | 26      |
| 4.2. Persepsi Nonanggota Kelompok Terhadap Berbagai Kegiatan Nagrak, 2006 .....                                              | 29      |
| 4.3. Persepsi Anggota Kelompok Simpan Pinjam, Pasantren, Nagrak, 2006 .....                                                  | 30      |
| 4.4. Persepsi Nonanggota Kelompok Simpan Pinjam, Pasantren, Nagrak, 2006 .....                                               | 30      |
| 5.1. Ranking Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Dusun Leuwijambe Menurut Ibu-ibu, 2006 .....                              | 31      |
| 5.2. Ranking Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Dusun Leuwijambe Menurut Bapak-bapak, 2006.....                           | 32      |
| 5.3. Persepsi Anggota Kelompok Pengrajin (Kelompok Maju Bersama) Terhadap Berbagai Kegiatan, 2006 .....                      | 41      |
| 5.4. Persepsi Peserta Pelatihan Peternakan, Dusun Leuwijambe, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, 2006 .....          | 42      |
| 5.5. Nilai Uji Penyerapan Materi Penyuluhan Peternakan, Dusun Leuwijambe, Desa Kadumanggu, Babakan Madang, Bogor, 2006 ..... | 42      |
| 5.6. Persepsi Anggota Kelompok Simpan Pinjam, RT 2, Dusun Leuwijambe, Desa Kadumanggu, Babakan Madang, 2006 .....            | 43      |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                                                                             | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1. Langkah Spiral Lewin .....                                                                                                             | 6       |
| 3.1. Diagram Alur Kerangka Pikir Kaji Tindak ( <i>Action Research</i> )<br>Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi dan<br>Bogor ..... | 12      |
| 3.2. Tingkatan Intervensi dalam Kegiatan Fasilitasi Masyarakat .....                                                                        | 13      |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                                                                                                                | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Karakteristik Agroindustri .....                                                                                                            | 52      |
| 2. Perencanaan Usahatani Pepaya oleh Anggota Kelompok Tani.                                                                                    | 58      |
| 3. Teknik Pengendalian Hama dan Penyakit dengan Beberapa<br>Macam Ramuan Pestisida Nabati .....                                                | 59      |
| 4. Alat dan Bahan Pembuatan Kompos .....                                                                                                       | 65      |
| 5. Pupuk Organik: Manfaat, Analisa Usaha dan Cara<br>Pembuatannya.....                                                                         | 66      |
| 6. Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Cara Efektif untuk<br>Mengentaskan Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi<br>Rakyat .....                    | 73      |
| 7. Hasil Analisis Skala Likert .....                                                                                                           | 77      |
| 8. Ringkasan Eksekutif Kaji Tindak ( <i>Action Research</i> )<br>Pemberdayaan Masyarakat Pertanian di Wilayah Tertinggal<br>Tahap Pertama..... | 87      |

## I. PENDAHULUAN

Tujuan akhir pembangunan pertanian tidak semata untuk peningkatan produksi, tetapi juga membangun masyarakat tani seutuhnya. Artinya, pembangunan pertanian tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sebagai individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pembangunan pertanian, diyakini bahwa program-program mikro dapat berperan bagi pemenuhan keperluan khas lingkungan budaya, pasar, dan iklim mikro tertentu dalam upaya peningkatan kehidupan petani. Disamping itu, program-program mikro tersebut dapat dibangun melalui sumber daya setempat, seperti pengetahuan tradisional, bakat-bakat kepemimpinan lokal yang menonjol, serta jenis-jenis organisasi setempat. Sebagaimana dikemukakan oleh Bunch (2001), program-program mikro memiliki tingkat keluwesan tinggi, sehingga memungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dinamika keperluan.

Pada saat pemerintahan Orde Baru, Indonesia mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang cukup berarti. Walaupun demikian, kesuksesan tersebut dicapai dengan menggunakan sistim pendekatan sentralisasi dan *top-down* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta sistim pengaturan keuangan. Pendekatan demikian berdampak negatif terhadap masyarakat karena mereka relatif sedikit dilibatkan dalam proses pembangunan, termasuk dalam menikmati manfaat pembangunan. Oleh karena itu, muncul berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dipelopori oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya difasilitasi agar mampu meningkatkan kesejahtraannya secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, suatu lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi pelaku dan penentu kegiatan pembangunan. Usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan baik lokal maupun regional, bahkan semestinya menjadi titik tolak bagi program nasional. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat antara lain : (1) program yang disusun sendiri oleh masyarakat; (2) menjawab keperluan dasar masyarakat; (3) mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya; (4) dibangun dari sumber daya lokal; (5) sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat; (6) memperhatikan dampak lingkungan; (7) tidak menciptakan ketergantungan; (8) berbagai pihak terkait saling terlibat; dan (9) berkelanjutan.

Kaji tindak partisipatif memerlukan waktu yang relatif lama, sedikitnya lima tahun, dan agar mampu berlanjut diperkirakan memerlukan waktu lima tahun. Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat

kat, diperlukan komitmen maksimal dari penentu kebijakan dan para pelaksana. Kegiatan seperti ini relatif tergantung pada inisiatif masyarakat dalam menentukan keperluan yang dianggap paling prioritas untuk dicarikan jalan keluar permasalahannya. Sementara itu, peneliti dan pemerintah daerah sekedar merespon kebutuhan tersebut. Namun secara umum, tujuan keseluruhan dari kegiatan pemberdayaan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat, yakni masyarakat yang mampu mencarikan jalan keluar masalah mereka sendiri. Hal ini tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga terkait dengan rasa keadilan, jaminan keamanan, peluang memperoleh pendidikan, peluang berusaha, dan berbagai kemudahan hidup lainnya.

Kaji Tindak Pemberdayaan Masyarakat Pertanian di wilayah tertinggal ini dilaksanakan untuk merealisasikan pernyataan-pernyataan di atas. Kajian ini sekaligus merupakan bagian dari rencana Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam rangka membangun laboratorium lapang di pedesaan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat. Implementasinya, dalam kegiatan ini peneliti PSEKP berperan sekaligus sebagai fasilitator bagi masyarakat setempat dalam kerangka tugas kerja penelitian dan tindakan (aksi) secara partisipatif (*participatory action research*).

Kajian ini merupakan kajian tahap kedua, melanjutkan tahap pertama yang sudah dilaksanakan tahun 2005. Pada kajian tahun 2005 telah ditentukan dua lokasi kegiatan, yaitu Kecamatan Nagrak (Kabupaten Sukabumi) dan Kecamatan Babakan Madang (Kabupaten Bogor). Lokasi di Sukabumi, ditentukan melalui proses pemilihan secara bertahap. Selain pemberdayaan masyarakat, kegiatan di Nagrak juga difokuskan pada usahatani lahan kering. Sementara itu, lokasi di Bogor telah ditentukan secara purposif menurut kepentingan khusus penanggulangan penyakit *anthrax*. Karena itu, selain pemberdayaan masyarakat, kawasan di Babakan Madang juga difokuskan pada penanggulangan penyakit *Anthrax*.

Di Sukabumi telah dilakukan sosialisasi ke aparat formal dan tokoh informal, dengan pelaksanaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk lebih mengenal lokasi dan masyarakat setempat, pengumpulan data kuantitatif (survei pendasaran) dengan daftar pertanyaan yang terstruktur, studi banding secara terbatas, perencanaan kelompok untuk kegiatan tahun 2006, dan berbagai pelatihan kelompok. Hal yang sama juga telah dilakukan di Bogor, yakni dengan fokus pengenalan sistem usaha pemeliharaan ternak ruminansia kecil. Data dan informasi mengenai profil masyarakat, lingkungan biofisik, usahatani dominan, dan perencanaan kegiatan masyarakat secara partisipatif telah disajikan dalam laporan kegiatan tahun 2005 (Basuno *et al.*, 2005). Di masing-masing lokasi telah diidentifikasi beberapa figur yang dapat dijadikan kader lokal, selain telah dirintis adanya kelompok yang akan dijadikan mitra kerja peneliti. Khusus di Sukabumi, kelompok tidak hanya terdiri dari para petani, tetapi juga anak-anak muda yang tertarik untuk mengorganisir diri.

Secara umum tujuan kajian tahap kedua ini adalah mewujudkan beberapa rencana kelompok yang telah digariskan dalam tahap pertama melalui fasilitasi kegiatan partisipatif. Secara spesifik tujuan kajian ini adalah : (1) Memfasilitasi kegiatan perencanaan, pelatihan, studi banding, dan implementasi kegiatan kelompok; (2) Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kelompok dan kegiatannya; (3) Mengidentifikasi kepekaan masyarakat dalam komunitas (*sense of community*) terhadap kerjasama kelompok; dan (4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation*).

Kegagalan kegiatan pemberdayaan biasanya terjadi karena pelaksanaannya tidak didasarkan pada keperluan masyarakat, tetapi pada asumsi-asumsi umum. Pelaksanaan seperti ini juga dapat berpangkal pada ketidaktahuan masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi (Johnston, 1982), sehingga menganggap pemberdayaan harus dilakukan secara *directive*. Karena kurang mengakomodasi keinginan masyarakat maka kegiatan menjadi bersifat sementara. Masyarakat merasa kegiatan yang dilakukan bukan milik mereka. Dalam kasus seperti ini, maka pemberdayaan tidak terjadi. Sebaliknya pemberdayaan melalui pendekatan kaji tindak yang bersifat partisipatif akan memberikan hasil yang lebih baik, dilihat baik dari segi pemahaman terhadap teknologi dan pengetahuan yang ditransfer, maupun dari segi kelangsungan kegiatannya.

Fasilitasi adalah teknik yang banyak dikembangkan dalam pelaksanaan pemberdayaan secara partisipatif, karena teknik ini memiliki tingkat intervensi yang sangat rendah (Sumpeno, 2004). Melalui teknik fasilitasi, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dapat terungkap, sehingga memungkinkan perencanaan dan penerapan transfer teknologi secara lebih baik.

Walaupun teknik fasilitasi dapat diterapkan untuk berbagai kegiatan, namun untuk kegiatan kaji tindak pemberdayaan masyarakat perlu dilihat faktor-faktor yang secara potensial mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Faktor-faktor tersebut terutama berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang mereka lakukan, dan kepekaan masyarakat dalam mendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

## **VI. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

### **6.1. Rangkuman**

#### **6.1.1. Kabupaten Sukabumi**

Terbentuknya kelompok yang kuat menjadi persyaratan masyarakat untuk mampu menolong diri mereka sendiri. Indikasi kelompok yang kuat antara lain, mampu mengumpulkan modal secara mandiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Disamping itu, kelompok yang telah mampu melaksanakan pertemuan kelompok, juga menjadi indikasi lainnya. Pada akhir tahun kedua, kepercayaan kelompok mulai berkembang melalui berbagai pelatihan, antara lain tentang pembentukan dan organisasi kelompok serta tentang pemberantasan hama penyakit. Respon positif Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa harian Republika terhadap permintaan kelompok untuk menjadi mitra dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemeliharaan domba menjadikan kepercayaan masyarakat untuk bekerja melalui kelompok semakin kuat.

Mengikutkan kelompok dalam suatu ekspose hasil kegiatan 2005 di Kantor Kecamatan Nagrak ternyata mampu memberikan kepercayaan diri yang tinggi terhadap anggota kelompok. Mereka antara lain secara langsung berani menanyakan penggunaan dana pembangunan yang dialokasikan ke Desa Balekambang. Demikian pula, kelompok menjadi lebih kritis terhadap kinerja aparat desa dalam melaksanakan pembangunan desa, termasuk dalam alokasi dana pembangunan secara transparan.

Kepercayaan yang telah diberikan kepada kelompok remaja melalui lahan sewa seluas 1.000 m<sup>2</sup> telah membuat mereka termotivasi dan menjadi serius dalam berusaha tani. Bahkan, remaja tani justru menjadi tulang punggung kelompok tani. Penanaman pepaya diharapkan mampu memberikan sumbangan secara signifikan terdapat penguatan modal kelompok. Memberikan keterampilan tertentu bagi remaja, baik putra maupun putri merupakan bentuk kepedulian yang perlu direalisasikan dimasa datang. Dengan keterampilan, diharapkan mereka mampu berkompetisi dengan remaja lainnya dalam memperebutkan kesempatan kerja yang saat ini belum berpihak pada mereka.

Melalui kegiatan simpan pinjam, ibu-ibu merasa diperhatikan. Diharapkan dengan menabung bersama, ketergantungan mereka terhadap bank keliling menjadi berkurang. Berkembangnya kegiatan simpan pinjam ibu-ibu menjadi indikator perlunya kegiatan yang sama perlu diperluas untuk kelompok ibu-ibu yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan simpan pinjam ini menjadi batu loncatan ibu-ibu untuk memulai usaha, baik secara bersama-sama maupun secara individual. Pengumpulan modal melalui kegiatan simpan pinjam belum diupayakan selama ini. Oleh karena itu, perluasan kegiatan simpan pinjam merupakan strategi yang perlu dikembangkan.

Persepsi anggota kelompok yang positif terhadap berbagai kegiatan kelompok seperti penguatan kelompok, pelatihan LPS di Pasantren, dan kunjungan ke LPS dan TDS menunjukkan bahwa kehadiran tim diperlukan di lokasi tsb. Namun demikian, khusus untuk upaya mengisi kas kelompok dan memotong sebagian hasil panen memerlukan upaya khusus melalui sosialisasi yang lebih baik. Bagi petani diluar kelompok, secara umum mereka mengetahui kegiatan kelompok serta manfaatnya, bahkan kalau memungkinkan, mereka ingin menjadi anggota. Secara detail umumnya mereka kurang mengetahui kegiatan kelompok, namun petani di luar kelompok menjadi potensi pengembangan selanjutnya kalau kelompok berhasil dengan program-programnya.

Terjadi perbedaan persepsi antara anggota dan nonanggota simpan pinjam. Anggota positif terhadap beberapa kegiatan yang diperkenalkan oleh tim, seperti fasilitasi, aturan pertemuan dan besarnya pinjaman. Tetapi yang menyangkut soal besarnya pinjaman dan minimnya anggota yang hadir dalam pertemuan persepsi kurang positif. Bagi non anggota, pengetahuan mereka terhadap pemberian pinjaman dan prosedur peminjaman positif, sedang fasilitasi tim dan besarnya pinjaman kurang positif. Hal ini dapat dimaklumi karena segala informasi yang berkaitan dengan simpan pinjam umumnya diterima secara tidak langsung.

### 6.1.2. Kabupaten Bogor

Kontak dengan berbagai instansi di tingkat Pemda Kabupaten Bogor mampu memberi dukungan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Dusun Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang. Secara spesifik, instansi-instansi tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (BPMKS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) dan Dinas Peternakan dan Perikanan.

Melalui sistem pelatihan yang tepat, yaitu *learning by doing* atau “*magang kintilan*” ternyata anggota kelompok pengrajin “Maju Bersama” mampu menyerap keterampilan yang diajarkan oleh *La NoNa Gallery* di Cikaret, Cibinong. Berbagai jenis perlengkapan rumah tangga yang dihasilkan membuktikan bahwa peluang yang diberikan dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok pengrajin. Disamping itu, dengan mengikuti berbagai pameran kerajinan dalam rangka promosi produk, wawasan anggota kelompok untuk maju semakin terbuka. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi kelompok pengrajin ini masih berkisar pada pemasaran, mengingat keterbatasan pengalaman mereka dalam memasarkan produk kerajinan.

Sebanyak 9 kali pertemuan dalam rangka Pelatihan Sapta Usaha Peternakan yang melibatkan petugas dari Dinas Perikanan dan Peternakan, telah mampu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa beternak harus menggunakan ilmu. Berbagai informasi tentang cara beternak yang sehat, tidak mengganggu kesehatan peternak dan keluar-

ganya serta lingkungan menjadi salah satu topik dalam pelatihan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pengembangan masyarakat melalui usaha peternakan ruminansia kecil di Dusun Leuwijambe, Desa Kadumanggu menghadapi dilema dengan adanya kenyataan bahwa daerah endemik anthraks tidak boleh dilakukan pengembangan ternak yang rawan terhadap anthraks.

Pemahaman sebagian besar peserta presentasi hasil Kaji Tindak T.A. 2005 terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang harus berawal dari masyarakat belum memadai. Orientasi mereka mengenai keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih berorientasi pada aspek administrasi. Keberlanjutan dan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat sebagai indikator keberhasilan kegiatan belum dijadikan indikator dan acuan baku dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Presentasi telah dilakukan melalui fasilitasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Kantor BPMKS, pada tanggal 9 Agustus 2006 di aula Kantor BPMKS.

Kelompok simpan pinjam yang dipersiapkan melalui ketua RT, seperti kasus di RT 2 Dusun Leuwijambe, memperlihatkan hasil yang relatif lebih baik dibanding dengan dua kelompok lainnya yang persiapannya tidak melalui ketua RT. Tampaknya dimasa datang, kegiatan simpan pinjam dalam rangka pemupukan modal kelompok perlu lebih memperoleh perhatian. Ketiadaan modal usaha di desa berakibat pada ketergantungan mereka kepada bank keliling yang menetapkan bunga tinggi (35 % /bulan).

Hasil analisis persepsi anggota kelompok pengrajin menunjukkan bahwa anggota kelompok menilai baik kegiatan yang mereka ikuti, termasuk partisipasi dalam pameran dan fasilitasi tim. Peserta penyuluhan Sapta Usaha Peternakan menilai waktu dan lamanya penyuluhan relatif baik, kualitas nara sumber dinilai cukup baik, sedang kualitas materi penyuluhan dan fasilitasi dianggap sangat baik. Hasil test dari seluruh materi penyuluhan menunjukkan bahwa peserta yang hadir pada penyuluhan terakhir dapat menyerap sekitar 70% bahan yang diberikan.

Anggota kelompok simpan pinjam sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, seperti tercermin dari persepsi mereka terhadap kegiatan ini dan juga dari hasil analisis Skala Likert. Untuk penentuan anggota dan adanya aturan untuk pertemuan secara rutin dianggap sempurna. Besar pinjaman, prosedur peminjaman, besar angsuran, dan topik diskusi dalam pertemuan juga dianggap sangat baik. Secara keseluruhan hal ini berarti anggota sangat menyetujui aturan simpan pinjam tersebut.

## **6.2. Implikasi Kebijakan**

Kerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sukabumi dan Bogor perlu ditingkatkan melalui

berbagai kontak lanjutan. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dari beberapa instansi lingkup Pemda dapat dijadikan fokus kerja sama, misalnya, melalui penyelenggaraan pelatihan terhadap aparat Pemda. Target kerja sama adalah aparat Pemda cukup memiliki kapasitas dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, bukan semata berorientasi pada tertib aspek administrasi. Monitoring dan evaluasi kegiatan Pemda yang berdimensi pemberdayaan masyarakat adalah aspek lain yang saat ini memerlukan perhatian.

Peran PSEKP terhadap pembangunan di Kabupaten Sukabumi dan Bogor di masa datang dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: (i) lebih saling mengenal antara para pembuat kebijakan di Pemda kedua kabupaten dengan pejabat PSEKP melalui berbagai pertemuan; (ii) mengupayakan adanya kerja sama kegiatan, misalnya, seminar bersama antara instansi pertanian terkait di kedua kabupaten dengan PSEKP; dan (iii) melakukan berbagai program pelatihan bersama baik bagi aparat Pemda kedua kabupaten maupun para peneliti/staf PSEKP dengan topik tertentu, sesuai kebutuhan.

Kegiatan pemberdayaan selama dua tahun relatif mampu menumbuhkan antusiasme anggota kelompok, khususnya anggota inti di kedua lokasi. Hal ini perlu memperoleh respon yang memadai dengan terus memfasilitasi mereka dalam bentuk pendampingan. Kalau dimungkinkan, memberikan stimulan, baik berupa uang sebagai modal kelompok maupun bantuan lain yang berupa natura sangat dianjurkan. Agar pengalaman kelompok binaan dapat diikuti oleh masyarakat lain, maka perlu diupayakan adanya keterlibatan pihak aparat desa dalam kegiatan kaji tindak. Disamping itu, berbagai pelatihan lanjutan dan studi banding ke kelompok-kelompok yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan sesuai permintaan.

Karena selama ini kelompok belum diikutsertakan dalam pembicaraan mengenai alokasi anggaran dari berbagai program pembangunan desa, maka dipandang perlu Pemerintah Desa Balekambang mengikutsertakan anggota kelompok tani untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagai anggota BPD. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan lebih mengetahui kebutuhan spesifik kelompok, sehingga alokasi anggaran pembangunan lebih tepat sasaran. Misalnya, manfaat berbagai program pemerintah, seperti Alokasi Dana Desa, Raksa Desa dan sebagainya akan menjadi lebih signifikan kalau ada partisipasi aktif anggota kelompok di dalam BPD.

Kegiatan simpan pinjam tingkat mikro diantara ibu-ibu perlu lebih digalakkan, kalau mungkin di setiap RT di kedua lokasi, dengan harapan mereka tidak terus tergantung pada bank keliling. Pengalaman selama enam bulan terakhir dapat dijadikan pelajaran dalam membentuk kelompok simpan pinjam ibu-ibu. Modal awal tetap diperlukan untuk memulai maksud tersebut.

Kontak dengan *Laa Nona Gallery* perlu dipelihara dan dikembangkan oleh kelompok pengrajin. Disamping itu juga perlu diupayakan kontak baru dengan *gallery* lain, untuk memberi lebih banyak pilihan bagi masyarakat. Motivasi yang timbul untuk memelihara kambing dan domba dengan lebih sehat perlu ditindaklanjuti bersama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan. Untuk mengupayakan beberapa hal di atas, maka dipandang perlu tersedianya kios milik desa, sebagai etalase di tepi jalan raya Babakan Madang untuk Kelompok Pengrajin dan Kelompok Tata Boga. Ketersediaan kios ini menjadi wewenang Pemda Kabupaten Bogor, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Dengan adanya kios, diperkirakan akses masyarakat luas yang membutuhkan berbagai produk kelompok, seperti produk kerajinan dan makanan, akan lebih cepat dan mudah.

Pihak Kecamatan Babakan Madang mengajukan permintaan agar kaji tindak diperluas lokasinya ke desa lain. Permintaan tersebut perlu disikapi dengan cermat, mengingat hal itu akan berakibat langsung pada penyediaan tenaga pendamping dan pendanaannya. Minimal, permintaan ini merupakan indikasi adanya ketertarikan *stakeholders* terhadap kegiatan kaji tindak yang telah dilakukan.

Di antara anggota kelompok, diamati adanya peningkatan kepercayaan diri cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya (2005). Kelompok tani di Dusun Pasantren misalnya, semakin memahami arti berkelompok dan semakin bergairah untuk mengumpulkan modal kelompok. Pada musim tanam tahun 2006, kelompok mulai menyediakan berbagai kebutuhan anggota, seperti pupuk, benih, dan obat-obatan. Pinjaman ini dibayar setelah panen, ditambah dengan 10 persen dari hasil panen untuk mengisi kas kelompok. Sebagai tempat menampung saprotan tersebut telah didirikan kios kelompok, sekaligus sebagai tempat berkumpul dan lokasi pemancar radio.

Selain itu, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah secara perlahan mulai merespon kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sedang dilakukan. Respon semacam ini merupakan sesuatu yang positif dalam suatu proses pemberdayaan. Ternyata berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan telah mampu membuka peluang anggota kelompok untuk berkembang.

Bagi kelompok tani di Dusun Pasantren, kontak dengan para narasumber dari LPS dan berlatih di LPS serta mengunjungi TDS mampu memberi wawasan tentang teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun ekspose hasil kegiatan tahun 2005 di Kantor Kecamatan Nagrak minimal mampu menarik perhatian para pembuat kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten dan Kecamatan Nagrak. Perhatian penyuluh pertanian terhadap kelompok di Pasantren mulai muncul setelah dilakukan kontak oleh tim kaji tindak, selanjutnya terjadi kontak antarmereka.

Modal kelompok yang diharapkan terkumpul pada tahun 2006, dapat digunakan sebagai tambahan modal berusaha tani pada tahun

2007. Dengan sekitar 800 pohon pepaya yang ditanam oleh anggota kelompok, modal kelompok akan mulai dikumpulkan secara mandiri. Modal kelompok juga akan bertambah dengan hasil panen kacang panjang yang ditanam para remaja tani pada lahan yang disewa.

Kegiatan simpan pinjam ibu-ibu yang baru dimulai dapat memutus sebagian ketergantungan mereka terhadap bank keliling. Peserta kelompok simpan pinjam merasakan manfaat menjadi anggota, terutama karena terbebas dari bank keliling. Jika kegiatan ini diintensifkan bukan tidak mungkin mereka akan sepenuhnya terlepas dari ketergantungan tersebut. Pencatatan administrasi dilakukan oleh anggota dan secara transparan selalu dilaporkan kepada anggota pada waktu akhir batas angsuran. Melalui simpan pinjam, secara perlahan-lahan dapat dimungkinkan terwujudnya kerja sama diantara anggota dalam menekuni suatu usaha bersama.

Dengan dapat terjualnya hasil kerajinan rumah tangga dari kelompok pengrajin di Dusun Leuwijambe saat mengikuti berbagai pameran kerajinan, maka kegiatan ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi kelompok. Tidak menutup kemungkinan bahwa berbagai kegiatan lain dapat dikembangkan oleh kelompok. Ide-ide baru terus muncul diantara mereka yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Perkenalan dengan *Laa Nona Gallery* menjadi pembuka jalan untuk berani mulai melakukan sesuatu. Untuk itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dalam rangka memberikan motivasi terus menerus kepada masyarakat.

Pemelihara ternak ruminansia kecil secara perlahan mulai menyadari pentingnya aspek kesehatan hewan dan aspek kebersihan lingkungan dalam memelihara ternak. Dampak yang dirasakan bagi kelompok yang bergabung dalam pemelihara ternak diperkirakan masih bersifat individual. Hasil penyuluhan yang berupa pengetahuan dan pemahaman beternak, baru dinikmati dan dipraktekkan oleh pemilik ternak dengan kepemilikan yang relatif banyak (sekitar 25 ekor), yang secara ekonomis relatif mampu.

Kegiatan Kaji Tindak telah mewujudkan terjalannya kerja sama antara tim PSEKP dengan berbagai instansi di Pemda Tingkat II, baik Sukabumi maupun Bogor. Bahkan baik Bapemdes di Sukabumi maupun BPMKS di Bogor menjanjikan alokasi anggaran untuk lokasi Kaji Tindak pada tahun 2007. Dengan Disperindag di Kabupaten Bogor misalnya, tim telah dikenalkan ke *Laa NoNa Gallery* sebagai tempat berlatih Kelompok Pengrajin Maju Bersama dari Dusun Leuwijambe. Dengan pihak Dinas Peternakan dan Perikanan dijalin kerja sama dalam penyuluhan Sapta Usaha Peternakan. Dengan Kantor BPMKS telah dilakukan kerja sama dalam pelatihan tata boga pada pertengahan November 2006.